

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Provinsi Kalimantan Utara adalah merupakan Gabungan dari inflasi Kota Tarakan, Tanjung Selor, dan Kabupaten Nunukan. Secara bulan ke bulan/*month to month* (m-to-m), pada bulan Januari dan Februari Povinsi Kalimantan Utara tercatat mengalami deflasi sebesar -1,35 persen dan -0,17 persen. Sementara itu, pada bulan Maret 2025 Kaltara tercatat mengalami inflasi sebesar 2,16 persen. 10 besar komoditas makanan yang memiliki bobot dominan dalam penghitungan inflasi Kaltara yaitu Beras 3,94%, Daging Ayam Ras 1,86%, Minyak Goreng 1,46%, Ikan Layang/Ikan Benggol 1,27%, Ikan Bandeng/Ikan Bolu 1,11%, Telur Ayam Ras 1,00%, Kue Basah 0,91%, Cabai Rawit Udang Basah 0,73% dan bawang merah 0,56%. Beberapa risiko kenaikan Inflasi Kalimantan Utara yang perlu diwaspadai pada Triwulan II Tahun 2025 adalah meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1446 Hijriah, Adanya potensi gangguan Cuaca yang dapat mengganggu kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan, serta terjadinya *shock* kebijakan pemerintah pusat yang di luar kewenangan daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dari sisi keterjangkauan harga terdapat permasalahan tingginya disparitas harga komoditas Kaltara dibandingkan dengan harga komoditas Provinsi lainnya di Indonesia dan banyaknya komoditas di pasar yang jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP). Dari sisi ketersediaan pasokan terdapat permasalahan rendahnya produksi komoditas lokal, ketergantungan pasokan dari luar, belum adanya gudang BULOG di wilayah Kabupaten Tana Tidung/ Kabupaten Malinau sehingga berpengaruh terhadap tingginya harga di kedua Kabupaten tersebut. Dari sisi kelancaran distribusi terdapat permasalahan keterbatasan infrastruktur konektivitas, mahalnya biaya bongkar muat barang dan buruh angkut, dan kerusakan jalan akibat faktor cuaca. Dari sisi komunikasi yang efektif terdapat permasalahan belum sinergi dan efisiennya anggaran untuk kegiatan pengendalian inflasi daerah serta adanya potensi ekspektasi inflasi karena meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan nasional (HBKN).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi Kalimantan Utara pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemantauan harga dan sidak pasar yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 di Pasar Induk Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan 28 Maret 2025 di Pasar Tenguyun, Kota Tarakan.
2. Melaksanakan kegiatan pasar murah dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok di 11 titik lokasi di Provinsi Kalimantan Utara.
3. 19 Februari 2025 di Desa Wonomulyo, Kabupaten
4. 20 Februari 2025 di Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kabupaten Bulungan.
5. 21 Februari 2025 di Lapangan Agathis, Kabupaten Bulungan.
6. 26 Februari di Kelurahan Kampung IV, Kota Tarakan.
7. 27 Februari 2025 di Kelurahan Juata Permai, Kota Tarakan

- 19 Maret 2025 di Masjid At Taqwa, Kabupaten Tanah Tidung
9. 20 Maret 2025 di Kelurahan Juata Laut, Kota Tarakan.
  10. 21 Maret 2025 di Kelurahan Kampung IV, Kota Tarakan.
  11. 25 Maret di Desa Kelubir, Kabupaten Bulungan.
  12. 26 Maret 2025 di Desa Bumi Rahayu, Kabupaten Bulungan
  13. 27 Maret 2025 di Desa Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.
  14. Melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada tanggal 24 Maret 2025 di Desa Wonomulyo, Kabupaten Bulungan.
  15. Melaksanakan rapat koordinasi rutin mingguan pengendalian inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring.
  16. Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka persiapan Gerakan Menanam Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025.
  17. Melaksanakan *High Level Meeting* TPID Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada tanggal 24 Maret 2025.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka memastikan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang tepat sasaran perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan sebagai bahan perbaikan lebih lanjut.

No	Kebijakan	Evaluasi
1.	Melaksanakan kerja sama antar daerah dengan daerah penghasil komoditas.	Kerja sama antar daerah dengan daerah belum dilaksanakan.
2.	Melaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) terhadap komoditas pemicu inflasi.	Operasi pasar dan GPM telah dilaksanakan dengan baik, tetapi belum berfokus pada komoditas penyumbang inflasi dan belum dilaksanakan pada titik wilayah yang angka inflasinya tinggi.
3.	Penguatan monitoring harga harian komoditas pangan strategis.	Monitoring harga harian sudah dilaksanakan oleh Disperindagkop melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui Panel harga Pangan serta Bank Indonesia melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dengan baik. Data pemantauan harga tersebut perlu dikolaborasikan dan dilakukan analisis lebih lanjut agar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi lebih tepat sasaran.
4.	Melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke distributor. Agen, dan pengecer agar tidak menjual barang dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).	Pelaksanaan sidak telah dilaksanakan di Bulungan dan Tarakan. Sidak perlu diintensifkan di seluruh wilayah dan difokuskan pada beberapa distributor yang menjual barang jauh di atas HET sehingga diharapkan dapat mencegah kelangkaan dan menindak apabila terjadinya penyimpangan.

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 5.  | Mewujudkan swasembada pangan daerah terutama terhadap komoditas pangan yang bisa dikembangkan di Provinsi Kalimantan Utara  | Upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sudah dilakukan, tetapi belum signifikan meningkatkan pasokan komoditas pangan daerah sehingga pasokan masih sangat bergantung pada daerah lain.  |
| 6.  | Mendorong peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah   | Peningkatan Cadangan Pangan pemerintah Daerah telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan bekerja sama dengan Perum BULOG utamanya terhadap komoditas beras. Perlu juga didorong cadangan pangan selain beras untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah.   |
| 7.  | Mendorong perbaikan sistem logistik daerah melalui penyediaan lahan untuk pembangunan gudang Perum Bulog terutama untuk wilayah Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan Kabupaten Malinau sebagai solusi untuk mengatasi tingginya harga komoditas di 2 (dua) kabupaten tersebut. | Belum adanya Gudang Perum Bulog di wilayah KTT dan Malinau menyebabkan tingginya harga komoditas di kedua wilayah tersebut sehingga perlu didorong adanya diskusi lebih lanjut antara Provinsi Kaltara, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau dan Perum BULOG Kantor Cabang Bulungan untuk merealisasikan dibangunnya gudang untuk mengefisienkan distribusi pasokan. |
| 8.  | Mendorong peningkatan infrastruktur pelabuhan di Provinsi Kalimantan Utara.   | Perlu adanya dorongan terhadap PT Pelindo (Persero) agar segera merealisasikan pengerukan dan pembangunan dermaga pelabuhan Malundung. Selain itu, perlu dilakukan pembangunan dan peningkatan pelabuhan yang dikelola oleh Provinsi untuk perbaikan jalur distribusi barang.  |
| 9.  | Mendorong pengaturan tarif bongkar muat barang dan buruh angkut sebagai solusi tingginya biaya bongkar muat barang.   | Belum dilakukan pengaturan tarif bongkar muat, sehingga perlu dilakukan kajian penurunan tarif bongkar muat barang dan biaya bongkar muat barang sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.  |
| 10. | Mendorong perbaikan dan pembangunan jalan utamanya pada titik-titik yang rawan longsor yang dapat berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang.   | Telah dilaksanakan perbaikan jalan pada titik-titik yang rawan longsor oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara dan Besar Balai Jalan Nasional Kalimantan Timur.   |
| 11. | Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah pusat dan daerah serta stakeholders lainnya untuk mendorong sinergi dan kolaborasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah.   | Telah dilaksanakan koordinasi secara rutin melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Mingguan TPID se-Indonesia, dan Rapat Teknis TPID Provinsi Kalimantan Utara.  |
| 12. | Menjaga ekspektasi inflasi masyarakat agar belanja bijak dan tidak melakukan <i>panic buying</i> .  | Sudah dilaksanakan sosialisasi belanja bijak oleh instansi terkait, tetapi ke depan perlu dilakukan sosialisasi secara masif melalui media informasi yang dimiliki oleh masing-masing instansi.  |

## 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Memperhatikan karakteristik Inflasi dan kelompok pengeluaran yang dominan terhadap angka inflasi Kalimantan Utara pada Triwulan I Tahun 2025, maka dapat direkomendasikan beberapa hal untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah di Triwulan II Tahun 2025.

No.	Strategi	Rekomendasi
1.	Keterjangkauan harga	<p>Perlu dilakukan kerja sama antar daerah</p> <p>Perlu dilakukan operasi pasar, Gerakan Pangan Murah berfokus pada komoditas yang sedang mengalami lonjakan kenaikan harga di atas HET.</p> <p>Penguatan monitoring harga harian komoditas pangan strategis.</p> <p>Pemberian subsidi pada komoditas yang sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penguatan pengawasan agar subsidi tepat sasaran bagi masyarakat.</p> <p>Mendorong peran BUMN dan BUMD dalam stabilisasi harga.</p> <p>Meningkatkan produksi beras lokal melalui cetak sawah dan peningkatan areal tanam.</p>
2.	Ketersediaan Pasokan	<p>Pendataan sawah yang belum ada irigasi/irigasinya rusak dan meningkatkan pompanisasi</p> <p>Peningkatan luas lahan pengembangan tanaman cabai di masing-masing kabupaten.</p> <p>Penguatan informasi cuaca untuk peningkatan produksi pertanian.</p> <p>Melakukan inspeksi pasar, distributor, agen, dan pengecer serta memberikan imbauan kepada distributor agar tidak menahan pasokan/penimbunan.</p> <p>Tindak Lanjut Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan daerah penghasil untuk mengisi persediaan selama masa tanam atau keterlambatan distribusi.</p> <p>Melaksanakan koordinasi bersama Kabupaten Tana Tidung dan Malinau dalam rangka membahas penyediaan lahan untuk pembangunan gudang Perum BULOG di salah satu wilayah tersebut.</p>
3.	Kelancaran Distribusi	<p>Mendorong dilaksanakannya pengerukan dermaga Pelabuhan Malundung, pembangunan dermaga Pelabuhan Malundung, pembangunan pelabuhan di Kabupaten Tana Tidung, dan pembangunan Pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.</p> <p>Perlunya dilakukan kajian penurunan tarif bongkar muat dan upah buruh pelabuhan.</p> <p>Mendorong perbaikan dan pembangunan jalan pada titik-titik yang rawan longsor.</p> <p>Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.</p>

4. Komunikasi yang efektif

Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah.

Meningkatkan komunikasi yang efektif untuk mengendalikan ekspektasi masyarakat dan mencegah panic buying.